



Judul : Tindak Tegas Penyedia Aplikasi
Tanggal : Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Tindak Tegas Penyedia Aplikasi

ANGGOTA Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno meminta pemerintah tegas kepada penyedia aplikasi jika ada pencurian data. Apalagi mereka menggunakan simbol agama untuk menarik pelanggan. Padahal, di balik itu ada maksud merugikan masyarakat. "Saya mengharapkan pemerintah bisa sepakat dengan DPR untuk menyelesaikan RUU PDP. Undang-undang ini sangat diperlukan, meskipun dinilai sudah sangat terlambat karena sudah banyak korban, bahkan kementerian pun sering kebobolan. Ini menandakan kurangnya kesigapan," ungkapnya.

Menurut Dave, UU PDP masih belum bisa disahkan karena masih ditemukan banyak kendala akibat beberapa poin yang belum disepakati. Namun, belum lama ini sudah ada titik temu dan diharapkan di sidang yang akan datang sudah dapat diputuskan. "Jika UU RDP sudah ditetapkan, banyak hal krusial yang diselamatkan seperti data masyarakat pada aplikasi. Artinya, ada pertanggungjawaban data yang dimiliki setiap orang, perusahaan atau lembaga sehingga ketika ada kebocoran, pencurian data ada yang bisa dihukum," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal menyatakan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, pasti menginginkan data-data pribadinya yang ada di suatu instansi, baik itu perusahaan swasta, pemerintah, ataupun di lembaga-lembaga lain itu aman, tidak dicuri ataupun diperjualbelikan. "Tapi jika kita melihat kasus-kasus kebocoran data yang terjadi Indonesia saya jadi khawatir, ada persoalan apa ini? bagaima-

mana sistem keamanan data di Indonesia?" katanya.

Iqbal mencontohkan pada 2020 terjadi sejumlah kasus kebocoran dari berbagai instansi, baik itu instansi swasta maupun pemerintah. Misalnya terjadi kebocoran 230.000 data pasien Covid-19, kemudian terjadi kebocoran 91 juta data akun Tokopedia, 13 juta akun Bukalapak dan masih banyak lagi kebocoran data yang lain. "Kemudian pada 2021 yang baru-baru ini 2 juta data nasabah BRI Life beserta dokumen penting dicuri oleh *hacker* dan isunya akan diperjualbelikan, belum lagi data BPJS," sebutnya.

Politikus PPP ini menilai, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis perlindungan data pribadi, bahkan penyimpanan data di Indonesia cukup lemah. Agar data-data tersebut tidak dicuri dan diperjualbelikan, dia meminta agar Kominfo memperkuat penyimpanan data terhadap instansi yang ada di Indonesia, baik swasta, pemerintah, ataupun lembaga-lembaga lain.

Iqbal menyebut, pertama, mendorong agar instansi tersebut melatih karyawannya meningkatkan *skill*, terutama terkait karyawan yang melakukan *inputting data* dan penyimpanan data. Kalau SDM tidak mumpuni, gampang data itu dibobol. Kedua, alat pendukung dan alat penyimpanannya yang harus sesuai dengan era sekarang. "Jika *skill*-nya bagus, tidak didukung alat, ya sama saja, *hacker* itu bukan hanya punya *skill* tinggi, dia didukung oleh alat-alat yang mumpuni. Jadi dua hal ini yang harus disiapkan," imbuhnya.

Ke depan perlu ada koordinasi yang terpadu antara

Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Cyber Crime Polri. Dia yakin, Polri dan BSSN dengan alat yang sangat canggih dan SDM yang mumpuni, serta Kominfo sebagai *leading sector* membuat perlindungan data bisa diwujudkan.

Namun, yang terpenting adalah tentang regulasinya, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah dibahas DPR penting untuk segera disahkan. Sebab, semua itu mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik data, sanksi penyalahgunaan data, dan sebagainya.

Sayangnya, Iqbal membeberkan, ada masalah yang mengganjal dalam pembahasan RUU ini: perbedaan pandangan mengenai pembentukan otoritas pengawas data pribadi, mayoritas fraksi di Komisi I menginginkan agar lembaga pengawas perlindungan data pribadi ini bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, tetapi pemerintah menginginkan di bawah Kementerian Kominfo. "Di dalam proses politik saya kira itu hal yang biasa, ada perbedaan pandangan dalam satu persoalan dalam pembahasan rancangan undang-undang, tetapi saya yakin periode ini, masa sidang ini, insyaallah kita sama-sama berharap, perbedaan pandangan itu bisa kita satukan, kemudian rancangan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang," harapnya.

□ **faorickpakistan/sabir laluhu/anandanararya**